

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEBELUM DAN PADA SAAT MASA PANDEMI COVID-19
DI DESA BU WATUWETI KECAMATAN TANAWAWO
KABUPATEN SIKKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



OLEH:

KRESENSIA IRNA ECI BUNGA

NIM: 2018110220

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SEBELUM DAN PADA SAAT MASA PANDEMI COVID-19
DI DESA BU WATUWETI KECAMATAN TANAWAWO
KABUPATEN SIKKA**

Kresensia Irna Eci Bunga¹⁾, Risnaningsih²⁾, Sri Indah³⁾
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang 2022
Email: echykresensia77@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sistem dalam kelola sebuah finansial yang berada pada Desa Bu Watuweti sebagaimana akan dapat berpatokan pada Pemendagri Tahun 2014 No 113 yang mana akan berkaitan dengan sistem pengelolaan anggaran yang ada pada sebuah desa. Sebuah mekanisme dalam mengelola sebuah laporan finansial desa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain : pertanggungjawaban, pelaksanaan serta planning. Sistem dalam pelaksanaan dalam mengelolah sebuah laporan finansial yang akan diatur berlandaskan pada APBN Desa akan dapat direncanakan finansial yang ada pada pihak pemerintahan yang berada di desa dalam tahun yang berjalan. Dalam riset ini menggunakan sebuah metode dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun data yang akan digunakan dalam riset ini ialah data sekunder serta primer. Teknik analisa data yang akan digunakan ialah sebuah laporan finansial dari periode 2018-2021. Adapun hasil yang ditemukan dari riset ini ialah sistem pengelolaan APBN Desa yang berada pada Desa Bu Watuweti pada saat sebelum dan sesudah adanya penyebaran virus corona. Dalam tahun 2019, dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Sedangkan tahun 2020-2021, dana desa difokuskan untuk penanggulangan pandemi covid-19. Dana desa tersebut dianggarkan untuk penanggulangan pandemi covid-19 dan pemberian BLT_DD bagi masyarakat yang terdampak pandemi secara ekonomi.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dapat didefinisikan sebagai salah satu lokasi atau wilayah yang mana akan dapat diberikan dalam sebuah tindakan atas kewenangan dengan tujuan untuk mengatur serta dapat melakukan sebuah tindakan atas mengatur pada urusan pemerintahan. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU Tahun 2014 No 6 serta pada pasal 1 yang disimpulkan bahwa Desa dapat didefinisikan sebagai salah satu tingkat kesatuan yang ada pada lapisan masyarakat yang berlandaskan pada asas hukum serta desa mempunyai batas-batas wilayah yang berhak untuk mengurus berbagai dengan pengurusan pemerintah demi sebuah kepentingan pada seluruh lapisan masyarakat yang berada di desa tersebut. Hak serta asal-usul yang mana akan dapat diakui serta dihormati berlandaskan pada sebuah mekanisme NKRI, tingkat atas kewenangan yang ada pada sebuah desa akan dapat diatur oleh pihak pemerintah yang ada berlandaskan pada otonomi desa.

Salah satu tindakan atas implementasi otonomi yang ada pada desa akan dapat dijadikan sebuah power terhadap desa dengan tujuan ialah untuk dapat melaksanakan serta membangun rumah tangganya sendiri, serta akan dapat dapat bertanggung jawab pada desa, akan tetapi dalam melakukan sebuah sistem pemerintahan yang ada, sehingga perlu diadakan sebuah tindakan atas pertanggung jawaban. Berdasarkan pada UU Tahun 2014 No 6 yang berkaitan desa sebagai salah satu pemerintah yang secara langsung akan dapat ber korelasikan dengan semua lapisan masyarakat.

Sebagaimana telah dikeluarkan Permendagri Tahun 2014 No 113 yang berkaitan dengan sistem pengelolaan finansial yang ada pada desa serta dapat pula akan diberikan sebuah tindakan

atas otonomi desa normative (Suhendri, H, 2022). Oleh sebab itu dalam melakukan pengelolaan finansial yang ada pada sebuah desa dengan semua aktivitas ialah pertanggungjawaban, penata usaha serta sistem atas perencanaan. Seharusnya dalam aturan yang dikeluarkan oleh menteri sehingga secara transparansi terhadap sistem pengelolaan anggaran desa serta dapat pul akan dilaporkan dalam aspek keterbukaan, sehingga akan dapat menimbulkan sebuah harapan dalam mengelola laporan finansial pun berlandaskan pada pendapatan atas belanja (Hanafi, 2015). (Kusnadi (2012) salah satu pendapatan yang dimiliki oleh desa ialah harta yang mana akan dapat mengakibatkan penambahan pada modal akan tetapi bukan saja dalam penambahan anggaran yang bersumber dari kepemilikan atautkah hutang melainkan dari usaha pada desa. Tingkat pendapatan yang ada pada desa dapat diartikan sebagai sebuah sistem atas penerimaan pada aktiva yang mana akan berperan demi membiayai sebuah tindakan dalam pemerintah desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 No 113 yang menyatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk belanja desa merupakan seluruh dari pengeluaran yang bersumber dari sebuah rekening dapat dianggarkan dalam kurun waktu satu periode, yang mana tidak dapat dibolehkan kembali terhadap sebuah tindakan atas pembayaran. Adapun sebuah pengertian yang akan dapat dijelaskan dalam paragraf tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya belanja desa dapat diartikan sebagai sebuah sistem terhadap pengeluaran dari sebuah rekening yang dimiliki oleh desa.

APBDes merupakan sebuah mekanisme dalam tahapan perencanaan dalam periode pemerintahan yang mana akan dapat dibicarakan serta dapat diakui secara simultan oleh pihak BPD serta dapat diputuskan pada sebuah aturan yang ada di desa, bahkan akan dijadikan sebuah sistem yang secara otomatis merupakan sebuah objek yang diberlangsungkan terhadap desentralisasi secara fiskal yang akan dimiliki dari pihak pemerintahan daerah serta pusat. Sistem

dalam pengelolaan sebuah anggaran yang dimiliki oleh desa akan dapat diruntuhkan terhadap sebuah kebijakan dalam desa dalam bentuk sebuah APBDes. yang mana memiliki tingkat keahlian pada pihak aparatur desa serta dapat bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat serta dapat dijadikan sebuah hal yang jauh lebih terpenting dalam melakukan sistem pembangunan yang berada dalam desa yang mana tidak akan terlepas dari lapisan masyarakat. Dalam kerjasama lapisan masyarakat bukan saja dari aspek perencanaan akan tetapi dapat dilihat juga dari berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan desa, oleh karena itu sistem terhadap sebuah tindakan penilaian pada pihak aparatur desa tidak baik sebagaimana dalam melakukan fungsi serta tugas dalam sebuah tindakan pelayanan terhadap lapisan masyarakat.

Pada dasarnya pihak pemerintahan berlandaskan pada surat keputusan Menku Tahun 2020/07 APBDes RI dengan adanya sebuah tindakan atas perubahan surat keputusan Menku Tahun 2019 No 205/PMK.07 terkait dengan sistem pengelolaan ADD yang akan dapat disalurkan sebagaimana dengan maksud serta tujuan untuk dapat berfokuskan pada APBDesa dengan tujuan ialah untuk dapat mengatasi penyebaran virus corona serta dapat membantu semua lapisan masyarakat yang berada di pedesaan. Pada prinsipnya anggaran pendapatan belanja desa dapat dipergunakan untuk dapat memaksimalkan sebuah sistem pelayanan secara umum serta merahi pada sisi kesejahteraan. Anggaran pendapatan belanja desa kan dapat ditata sebagaimana pada sebuah perencanaan serta sistem pembangunan yang akan diatur dalam jangka waktu serta akan dapat ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Sistem perencanaan dalam tergolongkan menjadi RPJM Desa yang mana dalam kurun waktu selama enam periode serta RKP Desa dapat diartikan sebagai sistematika yang bersumber dari RJPM Desa dalam kurun waktu satu periode.

Sistem pengelolaan terhadap finansial yang secara baik ialah sebuah mekanisme dalam melakukan sebuah tindakan atas pengelolaan anggaran serta dapat pula dipergunakan anggaran

yang ada dengan baik, oleh sebab itu pihak industri akan dapat menghasilkan sebuah pendapatan diperiode yang berikutnya. (Risnaningsih, 2017) yang menyatakan ialah dalam pengelolaan finansial yang akan dapat terhindar oleh pihak industri dari sebuah keganjalan dalam menjalankan sebuah usaha. Terhadap sistem dalam pengelolaan finansial yang dimiliki oleh desa maka akan dapat membutuhkan pada sebuah tingkat perencanaan sampai pada pertanggungjawaban pada pengguna. Terhadap sebuah tindakan atas pelaksanaan terhadap pengelolaan sebuah anggaran yang dimiliki oleh desa yang akan dapat dikelola secara terbuka. Dalam pengelolaan finansial sebagaimana berlandaskan pada Permendagri tahun 2014 No 113 yang mana akan dapat berikatan dengan sebuah patokan dalam mengatur finansial yang ada pada desa serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan desa dalam hal ini kepala desa serta yang menjadi pemegang atas kekuasaan. Oleh sebab itu akan dapat dibutuhkan sebuah tindakan atas pengawasan oleh pihak BPD yang mana akan bekerja sama terhadap lapisan masyarakat untuk dapat mengawasi jalannya sebuah sistem pemerintah yang ada di desa. Kejadian yang terjadi ialah bencana alam yang ada mempunyai sebuah pengaruh yang secara signifikan terhadap NKRI, yang mana dapat diperjelaskan oleh sistem perekonomian dalam lapisan masyarakat (Suhendri, et.al, 2022). Terjadinya penyebaran virus corona yang mana dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang mana dapat memberikan ancaman terhadap kesehatan. Misalnya aktivitas dengan tujuan untuk dapat mengatasi penyebaran virus corona atau begagai program yang lainnya serta dapat berkorelasi terhadap sistem atas pembangunan di PDPT 7 tahun 2021.

Sebagaimana yang akan diketahui oleh APBDes yang mana akan dapat dilakukan diakhir periode 2021 serta pimpinan negara dapat memberitahukan seluruh masyarakat di NKRI yang berada di Kota Bali telah terdampak penyebaran virus corona yang mana mereka telah berlibur di Kota Bali detiknews.com 26 April 2020). Pada dasarnya berita yang ada maka secara langsung

pihak pemerintah NKRI pada tahun 2021 akan mengeluarkan sebuah peraturan tahun 2021 No 8 yang berkaitan dengan sebuah surat edaran yang berkaitan dengan sistem penyusunan APBDes dengan tujuan ialah untuk dapat menyingkir sebuah pembelanjaan yang lainnya, sehingga anggaran tersebut dapat dilimpahkan pada bencana dalam bentuk darurat.

Salah satu tindakan atas perubahan anggaran dengan berdasarkan pada situasi dalam penyebaran virus corona maka secara langsung akan dapat diprediksi yang akan mengakibatkan atas perubahan anggaran. Sebagaimana dengan adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang berada di Desa Bu Watuweti sangat perlu untuk dapat dianggarkan terhadap pemberian bantuan yang akan disalurkan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu akan perlu dilakukan sebuah tindakan memindahkan anggaran. Sebagaimana dalam sebuah sistem terhadap pengelolaan finansial desa, maka pihak pemerintah yang berada di Desa Bu Watuweti seharusnya mampu untuk dapat memperhatikan sebuah program berdasarkan dengan perencanaan. Pihak pemerintah Desa Bu Watuweti dapat dikatakan sebagai sebuah mekanisme dalam mengelolah finansial pada porsi-porsi yang sudah ditetapkan.

Lapisan masyarakat yang berada di Desa Bu Watuweti mempunyai sebuah kewajiban dalam bekerja sama dengan tujuan untuk dapat memajukan perkembangan pada desa. Disamping itu juga lapisan masyarakat yang berada di desa mampu untuk melakukan sebuah pengawasan terhadap pemerintah. Dalam penyebaran virus corona secara langsung akan dapat mengancam perekonomian dalam kalangan masyarakat. Sedangkan pada tingkat bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak akan sampai terhadap masyarakat, yang mana timbul ketidakpuasan masyarakat dalam mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) Sebelum dan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bu Watuweti Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam latar belakang yang ada, maka dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah : bagaimana menganalisis APBDesa Sebelum Dan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bu Watuweti ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yang ada, maka dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah : untuk dapat mengetahui APBDesa sebelum dan pada saat masa pandemi covid-19 di Desa Bu Watuweti.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

1. Untuk dapat menambah pemahaman tentang analisis pengelolaan APBDes sebelum dan pada saat masa pandemi covid-19 di Desa Bu Watuweti Kecamatan Tanawawo Kabupaten Sikka.
2. Menambah Wawasan pengetahuan serta juga dapat menginterpretasikan kajian ilmiah yang ada dengan tujuan untuk dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan

b. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi

1. Secara langsung akan dapat mengasah keahlian dengan tujuan untuk mampu menerapkan ilmu yang telah diterima dibangku kuliah.
2. Untuk meningkatkan, memperluas keterampilan serta mampu menerapkan ilmu akuntansi.

c. Bagi Desa Bu Watuweti

1. Untuk dapat dijadikan sebuah dasar dalam pengambilan sebuah keputusan
2. Bisa dijadikan sebuah data atau informasi dalam memahami situasi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA*, 07(07), 14–28.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619*, 10(4), 1–23.
- Karmawan, & Yanuar, D. (2018). Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget. *IJBE: Integrated Journal of Business and Economics e-ISSN: 2549-3280*, 39–48.
- Lestari, Y. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(6), 1474–1483.
- Nurhayati, Yunawati, S., & Suhairi. (2016). Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP*, 2(1), 1–6.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek*, 7(1), 139–148.
- Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). The Impact of Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia), *European Journal of Business and Management*, 14 (6): 49 – 53.
- Suhendri, H. 2022, 28 Juni. Akuntansi Desa & Pengelolaan Keuangan Desa Bagian I. Hendrik Suhendri [video]. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=bZzChJYM44c>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yuliansyah,& Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.

Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDesa
Transparan dan Partisipasi (Studi Pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh). Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(3), 431–442.